
e- Governance Perguruan Tinggi Dalam Era Digitalisasi

Ni Nyoman Lisna Handayani¹, Ni Ketut Erna Muliastri², I Putu Suardipa³

¹STAHN Mpu Kuturan Singaraja, ²Universitas Pendidikan Ganesha,

³STAHN Mpu Kuturan Singaraja

e-mail: lisnahandayani201@gmail.com, erna.muliastri@undiksha.ac.id,
putu.suardipa@yahoo.com

ABSTRAK

Eksistensi perguruan tinggi di era teknologi informasi dan digitalisasi, memerlukan sistem *e-governance* perguruan tinggi yang berkualitas agar mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan melalui penelusuran terhadap sejumlah literatur sebagai sumber primer. Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem tata kelola perguruan tinggi juga harus memperhatikan prinsip *Good University Governance* dalam mengurangi resiko kesalahan dalam pengelolaannya. Dengan ruang lingkup *Good University Governance* yang meliputi unsur perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara terus menerus dilakukan berdasarkan monitoring dan evaluasi. Perwujudan tata kelola perguruan tinggi yang diharapkan harus dilakukan secara bertahap, terencana, dan terprogram dengan kerangka waktu yang jelas mulai dari tata kelola penjaminan mutu, tata kelola aspek fungsional termasuk tata kelola keuangan, dan tata kelola informasi dan digitalisasi. Dengan demikian, belajar dari praktek perguruan tinggi kelas dunia, dapat dilakukan dengan memperoleh kiat sukses agar tata kelola perguruan tinggi menjadi lebih berkualitas serta menghasilkan lulusan yang berkualitas dan siap bersaing.

Kata kunci: *e-governance*, digitalisasi

ABSTRACT

In maintaining the existence of higher education institutions in the era of information technology and digitalization, a quality higher education system is needed to be able to adapt to the dynamics of change. The type of research in this article is qualitative research through tracing a number of literatures as primary sources. The results of the study show that the higher education governance system must also pay attention to the Good University Governance principle in reducing the risk of errors in its management. With the scope of Good University Governance which includes elements of planning, implementation, control, and continuous quality improvement based on monitoring and evaluation. The realization of higher education governance is expected to be carried out gradually, planned, and programmed with a clear time frame starting from quality assurance governance, functional aspect governance including financial governance, and information

governance and digitization. Thus, learning from the practice of class university colleges can be done by obtaining successful tips so that higher education governance will be of higher quality and produce qualified graduates who are ready to compete.
Key Words: e- governance, digitization

I. Pendahuluan

Awal abad XXI ini adalah masa dimana dunia berada dalam fenomena globalisasi, yakni terciptanya pasar bebas dunia, dan terjadi aliran bebas dari modal, teknologi, orang dan barang serta informasi. Suka atau tidak suka, mau tidak mau, globalisasi akan terus berlangsung. Tidak ada aturan apapun dari negara manapun yang dapat mencegah globalisasi (Thurow, 1996). Transmisi informasi dengan kecepatan elektromagnetik telah memperlancar terjadinya globalisasi serta meningkatkan intensitas kompetisi (Lodge, 1995). Kompetisi bernilai positif bagi pemainnya hanya bila ia dapat memenangkannya, setidaknya harus dapat bertahan agar tidak sampai terpental dari permainan tersebut. Tidak mengikuti kompetisi globalisasi berarti keterpurukan, mungkin bahkan sampai pada kesirnaan dan non eksistensi (Besari, 2001). Jadi satu-satunya pilihan adalah ikut kompetisi serta berusaha untuk tetap bertahan dalam permainan tersebut sampai jauh dimasa datang.

Mengantisipasi dinamika perubahan yang begitu cepat dan tantangan yang semakin kompleks, pendidikan tinggi harus mengupayakan segala macam cara dalam meningkatkan daya saing lulusan yang memiliki softskill dan kompetensi sebagai nilai tambah saat diterima di dunia kerja. Perguruan tinggi juga harus terus meningkatkan mutu pendidikan dengan tata kelola perguruan tinggi yang baik atau *Good University Governance* yang baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan sesuai dengan aturan yang berlaku (Wahyudin dkk, 2017). Dengan menerapkan *Good University Governance* maka perguruan tinggi akan mampu bersaing dan akan tetap terjaga eksistensinya.

Perguruan tinggi merupakan bagian dari organisasi dengan entitas dibentuk sesuai dengan hukum yang berlaku sesuai dengan visi-misi dan tujuan pembentukannya dalam meningkatkan mutu pendidikan (Logli, 2016). Perguruan tinggi yang berkualitas harus secara terus menerus meningkatkan kualitas kinerja dalam pengembangan

tridarma perguruan tinggi. Sebagai suatu entitas yang spesifik dalam dunia pendidikan, perguruan tinggi tentunya memiliki tujuan yang spesifik pula sesuai dengan karakteristik lingkungan internal maupun eksternal. Setiap perguruan tinggi memiliki tujuan dan cita-cita masing-masing yang dinyatakan dalam visi dan misi yang disusun bersama *stakeholders* yang ikut berpartisipasi dalam merumuskannya (Sayidah dkk, 2019).

Banyak unsur-unsur strategis yang harus diperbaiki dan ditingkatkan dalam pengembangan perguruan tinggi diantaranya kualitas program akademik, kualitas sumberdaya manusia, kualitas sarana prasarana, dan suasana akademik yang mendukung. Agar unsur-unsur strategis tersebut bisa ditingkatkan, maka perlu didukung dengan metode untuk merealisasikannya yaitu dengan tata kelola yang baik atau berkualitas. Karena itu, untuk menghadapi tingkat persaingan yang semakin tinggi di antara perguruan tinggi di Indonesia, maka setiap perguruan tinggi membutuhkan perubahan yang fundamental untuk bisa bersaing di era kemajuan teknologi informasi, apalagi menargetkan untuk bisa berkiprah dalam kompetisi global.

Tata kelola merupakan suatu metode yang digunakan perguruan tinggi dalam memanfaatkan seluruh potensi secara optimal dan sebagai upaya pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Secara teknisnya, tata kelola dipahami sebagai upaya sistematis dalam proses pencapaian tujuan yang diharapkan, melalui fungsi-fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, serta evaluasi. Oleh karena itu, tata kelola melingkupi seluruh proses, unsur-unsur tata kelola, serta memiliki tujuan utama dalam peningkatan kualitas perguruan tinggi yang berkelanjutan dalam mencapai visi dan misi yang diharapkan sebagaimana dalam rencana strategi perguruan tinggi (Kadir, 2013).

Tata kelola bermutu bila dibarengi dengan suasana akademik dan budaya organisasi yang kondusif yang dibentuk dengan menumbuhkan dan menghadirkan kepedulian, rasa memiliki, dan komitmen kebersamaan yang tinggi bagi semua civitas akademika. Isu penerapan prinsip *good governance* pada perguruan tinggi semakin menarik perhatian diberbagai kalangan termasuk peneliti (Sayidah dkk, 2019) (Risanty & Kesuma, 2019). Konsep *good governance* dianggap dapat menjadi obat mujarab ataupun upaya preventif dalam meningkatkan kualitas tata kelola perguruan tinggi (Wahyuddin dkk, 2017).

Paradigma tata kelola perguruan tinggi yang baik, pada saat ini menjadi pilihan handal untuk mencapai kesuksesan dalam suatu organisasi. Secara umum tata kelola terkait dengan aspek transparansi, akuntabilitas, kepemimpinan, komitmen, tanggung jawab, dan unsur lainnya. Tidak hanya itu, tata kelola yang baik mampu mengharuskan adanya perubahan dan inovasi dari sistem yang ada dalam mencapai visi dan misi perguruan tinggi.

Sistem tata kelola yang baik, dapat menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi, dan keseimbangan peran, serta adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh komponen atau pihak yang terkait. Menurut Syakhroza (2003), *Good governance* didefinisikan sebagai suatu mekanisme tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis ataupun produktif dengan prinsip-prinsip terbuka, akuntabilitas, pertanggung jawaban, independen, dan adil dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Good University Governance merupakan suatu konsep yang muncul karena kesadaran bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi, memang tidak dapat disamakan dengan pengelolaan sebuah negara atau korporasi. Perbedaannya adalah berkaitan dengan nilai-nilai luhur pendidikan yang harus dijaga dan diimplementasikan dalam proses pendidikan. Sehingga, sangat perlu ditentukan suatu indikator perguruan tinggi telah menerapkan *Good University Governance* atau tidak, dan bisa diketahui sejauhmana perguruan tinggi tersebut mampu menyikapi dinamika yang terjadi dalam penyelenggaraannya tanpa mencampakan nilai-nilai luhur bangsa dan amanat yang diembannya dari masyarakat, bangsa dan negara (Rahayu & Wahab, 2013).

Jenis penelitian dalam artikel ini yaitu penelitian kualitatif melalui penelusuran terhadap sejumlah literatur sebagai sumber primer dalam penelitian ini. Metode penulisan ini menggunakan metode deskriptif analitis yang bersifat normatif filosofis berdasarkan sumber-sumber kepustakaan. Sedangkan, obyek penelitian lebih fokus membahas tata kelola perguruan tinggi era informasi dan digitalisasi dengan menganalisis kondisi kelembagaan pendidikan tinggi di Indonesia secara umum.

II. Pembahasan

Pembahasan tata kelola dalam sebuah organisasi tidak lepas dari tata nilai. Dalam hal ini ada pertanyaan penting mengenai apa yang disebut tata nilai dalam perguruan tinggi, bagaimana kaitannya dengan sistem manajemen perguruan tinggi, bagaimana kaitannya dengan struktur organisasi yang dapat mendukung proses penambah nilai bagi pengguna, bagaimana kaitannya dengan gaya kepemimpinan rektorat dan dekanat dan sebagainya. Perguruan tinggi perlu mempunyai *shared value* yang intinya pada pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan. Dalam tata nilai ini, ada kemungkinan sebuah universitas masih belum mempunyai *shared-value* yang berfokus pada pengembangan ilmu, sehingga gagal mempunyai dasar kuat dalam memberikan nilai tambah bagi penggunanya. Logika berpikir sederhana dapat menangkap arti ini. Ketika sebuah universitas tidak mempunyai nilai-nilai kuat yang terkait dengan berbagai hal di atas, maka fungsi pelayanan dan pendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian dapat turun kinerjanya.

Perguruan tinggi merupakan sebuah pihak yang memiliki pengaruh yang cukup besar dalam penentuan kebijakan. Jikalau masuk dalam kajian kebijakan publik, maka perguruan tinggi dapat dimasukkan ke dalam *epistemic community*. Perguruan tinggi memiliki para profesional yang memiliki kajian dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dan hal tersebut dibutuhkan oleh para pembuat kebijakan. Untuk melihat keterlibatan perguruan tinggi dalam hubungan internasional khususnya integrasi regional maka dapat melihat akar dari hubungan internasional itu sendiri yaitu ilmu politik. Selain itu, dapat dilihat manfaat bagi perguruan tinggi yang memanfaatkan integrasi regional (bahkan global) yang telah ada dengan melakukan internasionalisasi.

Dunia pendidikan tidak terbebas dari perubahan besar yang sedang berlangsung. Beberapa perubahan memberikan harapan, sedangkan yang lain merupakan ancaman bagi bentuk pembelajaran tradisional. Tapscott (1996) meramalkan ada enam pendidikan baru di era digital:

- 1) Belajar dan bekerja akan cenderung menjadi satu hal.

Dalam tata ekonomi lama, keahlian dasar seorang pekerja industri, tukang batu, atau supir bis relatif tetap. Paling-paling berbeda sedikit untuk lokasi atau kendaraan yang berbeda. Komponen belajar dari pekerja relatif kecil. Tetapi dalam tata ekonomi baru, komponen belajar dari angkatan kerja sangat besar.

Seorang ahli riset genetika, software developer, manajer bank, konsultan, wirausaha, atau asisten dosen, pada waktu bekerja mereka juga sekaligus belajar hal-hal baru.

2) Belajar akan menjadi tantangan seumur hidup.

Dalam tata ekonomi lama, hidup terbagi dua ke dalam masa belajar dan masa bekerja. Setelah lulus, tantangan bagi seorang sarjana adalah cukup dengan mengikuti perkembangan ilmu dibidang spesialisasinya. Nanti, setiap orang harus melengkapi terus menerus kemampuannya dengan ilmu-ilmu baru yang tidak terbayangkan semasa kuliah.

3) Belajar tidak lagi harus di sekolah atau universitas

Di Eropa, pendidikan tinggi, mula-mula dilaksanakan dan dibiayai oleh gereja, lalu bergeser ke pemerintah, kemudian bergeser lagi ke pundak dunia bisnis, karena merekalah yang pada ujungnya harus melatih pekerja yang berpengetahuan (Davis, 1994). Di era digital, dunia bisnis harus sekaligus menjadi sekolah, kalau mau menang bersaing. Sebab ekonomi baru adalah ekonomi pengetahuan dan belajar menjadi aktivitas dan kehidupan sehari-hari. Pendidikan dan pelatihan intern perusahaan sudah meningkat 100 kali lebih cepat dari pada pertumbuhan kampus konvensional antara 1960- 1990 di Amerika Serikat.

4) Lembaga Pendidikan lambat menyesuaikan diri

Teknik belajar mengajar pada lembaga pendidikan formal belum banyak berubah sejak ratusan tahun yang lalu.

5) Perlu kesadaran organisasi untuk terus belajar

Tidak ada kesempatan untuk ikut bersaing saat ini, kecuali bagi organisasi yang mau belajar terus menerus. Dan yang akan memenangkan persaingan adalah organisasi yang belajar lebih cepat dari saingannya. Hal ini harus dicapai melalui partisipasi tim di berbagai level. Jaringan antar tim bisa meningkatkan kesadaran keseluruhan organisasi.

6) Media baru akan mengubah bentuk pendidikan

Melalui internet, buku-buku dan informasi langka bisa diakses oleh jutaan manusia. Lokasi belajar sudah menembus dinding-dinding kelas. Dengan akses

terbuka ke dunia informasi, murid bisa melampaui guru yang masih terpaku pada pola belajar masa lampau. Teknologi baru telah mengubah peran dosen menjadi motivator dan fasilitator bagi mahasiswanya, tidak lagi menjadi pengulang fakta. Objek ilmu pengetahuan bisa diperoleh dengan menjelajahi situs di *cyberspace*. Mahasiswa ketika berada dimana saja bisa mengikuti kuliah secara interaktif dari seseorang guru besar tersohor tentang topik yang aktual. Mahasiswa juga bisa memutar ulang kuliah-kuliah yang terlewat, diwaktu luangnya. Ujian bisa dilakukan sewaktu-waktu. Kurikulum bisa lebih responsif kepada kebutuhan dan minat mahasiswa. Juga bisa diubah disesuaikan kepada kebutuhan dunia usaha yang senantiasa berubah cepat. Dan pesertanya adalah mahasiswa murni maupun pegawai dan pekerja yang tersebar diberbagai tempat terpisah.

Prinsip utama yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Prinsip tersebut sangat erat kaitannya dengan prinsip *good governance* dengan ciri-ciri yaitu sebagai berikut.

- a) Transparansi, yaitu tentang suatu kebijakan, regulasi, program, kegiatan dan anggaran perguruan tinggi diketahui dan dipahami oleh sivitas akademika sehingga mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam memajukan perguruan tinggi.
- b) Akuntabilitas, yaitu tentang tingkat pertanggungjawaban pimpinan perguruan tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- c) Pengorganisasian, yaitu tentang sejauh mana pimpinan perguruan tinggi mampu menerapkan berbagai prinsip pengorganisasian, seperti menetapkan tata hubungan kerja, rincian tugas pokok, fungsi/wewenang serta melakukan *directing* (pengarahan) dengan prinsip persamaan derajat (*equity*) dan inklusifitas (*inclusiveness*).
- d) Partisipatif, yaitu tentang proses pengambilan keputusan strategis perguruan tinggi melibatkan stakeholders eksternal, sehingga stakeholders dapat mendukung penyelenggaraan perguruan tinggi secara aktif.

- e) Responsif, yaitu tentang sejauh mana kebijakan, regulasi/ aturan, program, termasuk dalam pengalokasian anggaran mendapat dukungan dan tanggapan positif dari sivitas akademika.
- f) Efisiensi dan Efektivitas, yaitu tentang seberapa besar upaya pimpinan perguruan tinggi untuk membuat sivitas akademika faham, dan dapat memberi komitmen terhadap kebijakan/ regulasi dan program yang telah ditetapkan.
- g) *Leadership* yang tunduk pada aturan yang berlaku (*rule of law*). Prinsip ini yaitu tentang kepemimpinan perguruan tinggi yang mampu menciptakan suasana kerja yang kondusif dan menginspirasi civitas akademika agar bekerja secara produktif dalam upaya pencapaian visi dan misi perguruan tinggi.

Prinsip ini sangat diperlukan dalam pengelolaan perguruan tinggi menjadi *good governance*. Prinsip utama tersebut tidak dijalankan secara terpisah, melainkan harus dipenuhi secara integratif dan dilaksanakan secara simultan. Sehingga, visi dan misi perguruan tinggi bisa tercapai sesuai dengan program yang telah disusun dalam rencana strategi perguruan tinggi dan tujuan dasar pendidikan tinggi. Salah satu keistimewaan institusi perguruan tinggi yaitu terletak pada fungsi dasarnya dalam hal pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Secara umum, ruang lingkup *good governance* meliputi unsur perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara terus menerus berdasarkan monitoring dan evaluasi.

- a) Perencanaan, merupakan suatu penetapan kebijakan, penyusunan program, dan anggaran dalam rencana strategis perguruan tinggi, serta merumuskan cara dalam melaksanakan programnya. Perencanaan melingkupi penetapan kerangka waktu (*time frame*) yang diharapkan dalam upaya pencapaian program pencapaian jangka pendek maupun pencapaian jangka panjang dengan melibatkan seluruh sumberdaya dalam melaksanakan kebijakan.
- b) Pelaksanaan, merupakan proses merealisasikan program yang direncanakan. Tahapan ini dilaksanakan dengan melibatkan seluruh sumberdaya secara optimal dalam melaksanakan semua perencanaan sebagaimana yang telah disusun dan dideskripsikan dalam rencana strategis perguruan tinggi. Dalam unsur

pelaksanaan, seluruh sumberdaya juga dilibatkan dalam pelaksanaan seluruh program.

- c) Pengendalian, dalam tahap pelaksanaan kegiatan monitoring sangat penting, sebagai upaya mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan melakukan upaya perbaikan secara langsung agar kebijakan dapat sepenuhnya dilaksanakan sebagaimana yang telah direncanakan.
- d) Peningkatan kualitas, merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas sistem pengelolaan perguruan tinggi, setelah dilakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan.

Tata kelola penjaminan mutu perguruan tinggi dimulai dengan memperkuat kelembagaan sistem penjaminan mutu internal (SPMI), penyusunan dan penerapan standar kebijakan mutu (*quality policy*), audit mutu, hingga peningkatan mutu yang berkelanjutan. Hal ini didukung penjelasan Rahayu & Wahab (2013), bahwa tata kelola organisasi secara baik apakah dilihat dalam konteks mekanisme penilaian internal organisasi ataupun mekanisme penilaian eksternal organisasi. Sistem penjaminan mutu perguruan tinggi (SPMPT) dilaksanakan dengan dasar penjaminan mutu internal, penjaminan mutu eksternal, dan proses perijinan penyelenggaraan program (Kadir, 2013). Adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut.

- a. Penjaminan Mutu Internal

Penjaminan mutu internal merupakan suatu proses perbaikan mutu yang dilakukan oleh institusi perguruan tinggi sesuatu dengan rencana strategis perguruan tinggi. Parameter dan metoda mengukur hasil ditetapkan oleh perguruan tinggi sesuai visi dan misinya, serta mengacu pada standar akreditasi nasional. Dengan menjalankan penjaminan mutu internal, maka institusi pendidikan tinggi sebaiknya melakukan evaluasi internal disebut evaluasi diri secara berkala. Evaluasi diri dimaksudkan untuk mengupayakan peningkatan kualitas yang berkelanjutan.

- b. Penjaminan Mutu Eksternal

Penjaminan mutu eksternal merupakan upaya perbaikan mutu perguruan tinggi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau lembaga lain yang diakui oleh BAN-PT. Parameter dan metode mengukur hasil ditetapkan oleh lembaga akreditasi yang melakukan sesuai dengan 9 (sembilan)

standar yang ditetapkan di antaranya (1) visi, misi, tujuan, dan strategi; (2) tata pamong, tata kelola, dan kerjasama; (3) mahasiswa; (4) sumber daya manusia; (5) keuangan, sarana, dan prasarana; (6) pendidikan; (7) penelitian; (8) pengabdian kepada masyarakat; dan (9) luaran dan capaian tridharma (BAN-PT, 2019). Akreditasi oleh lembaga akreditasi dimaksudkan untuk melakukan evaluasi eksternal untuk menilai kelayakan program institusi pendidikan tinggi. Selain menilai kelayakan program, akreditasi juga dimaksudkan untuk pemberian saran peningkatan dalam mengupayakan peningkatan kualitas berkelanjutan.

c. Perijinan Penyelenggaraan Program

Perijinan penyelenggaraan program diberikan oleh Ditjen-Dikti untuk satuan pendidikan yang memenuhi syarat penyelenggaraan program pendidikan. Tata cara dan parameter yang digunakan ditetapkan oleh Ditjen-Dikti sesuai ketentuan yang ada. Perijinan selain dimaksudkan sebagai evaluasi eksternal juga untuk menilai kelayakan kepatuhan penyelenggaraan program. Dengan demikian, penjaminan mutu perguruan tinggi secara keseluruhan dimaksudkan untuk melakukan peningkatan kualitas institusi pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

Revolusi teknologi informasi dan digitalisasi telah menjanjikan struktur interaksi manusia yang lebih cepat dan lebih efisien dengan kualitas yang sama. Revolusi informasi global merupakan keberhasilan manusia modern dalam menyatukan kemampuan komputasi matematis dengan media elektronik dan media cetak menjadi terintegrasi antara satu dengan yang lainnya. Hal ini adalah suatu kombinasi revolusi di bidang komputer personal, transmisi data, lebar pita (bandwidth), teknologi penyimpanan data (data storage), dan penyampaian data (data access), integrasi multimedia dan jaringan komputer.

Konvergensi dari revolusi teknologi tersebut telah menyatukan berbagai media, yaitu suara (voice, audio), video, citra (image), grafik, dan teks (Sallis, 2014). Hal ini terjadi sebagai akibat dari revolusi teknologi informasi yang telah merubah kehidupan manusia dengan cara kerja yang lebih kreatif, efektif, dan praktis. Sebagaimana dua sisi kehidupan manusia selalu pada dua keadaan yaitu baik dan buruk, demikian halnya

dengan teknologi informasi. Teknologi ini seharusnya dimanfaatkan dengan benar dan diperhitungkan secara matang, sebab apabila keliru dalam penggunaannya maka akibatnya secara fatal bagi kehidupan manusia (Harun, 2019).

Revolusi teknologi informasi dalam dunia pendidikan dapat mempengaruhi bentuk pilihan teknologi yang digunakan. Revolusi ini juga telah mempengaruhi semua aspek kehidupan manusia dari segala bidang mulai dari bidang kesehatan, entertainment, pemerintahan, perdagangan, pola produksi, hingga mempengaruhi pola relasi antar masyarakat. Hal ini telah menjadi tantangan bagi semua bangsa, masyarakat dan individu masa kini dan masa yang akan datang. Siap tidak siap lembaga pendidikan harus menyambutnya dengan baik dan harus beradaptasi dengan perubahan tersebut (Laila, 2012). Perguruan tinggi harus menyiapkan seluruh unsur dalam sistem pendidikan agar tidak tertinggal atau ditinggalkan oleh perkembangan tersebut. Melalui penerapan dan pemilihan yang tepat teknologi informasi, maka perbaikan mutu pendidikan yang diharapkan dapat tercapai dengan baik. Perbaikan tersebut harus berlangsung terus-menerus dan konsisten agar dapat mendorong perguruan tinggi dalam memperbaiki proses pendidikan. Adanya revolusi informasi dapat menjadi tantangan bagi perguruan tinggi dan akan menjadi peluang yang baik bila perguruan tinggi dalam menyikapi dengan penuh keterbukaan dalam menghadapi dinamika perubahan tersebut.

III. Penutup

Sistem tata kelola perguruan tinggi dalam dalam era informasi dan digitalisasi akan berhasil, jika awali dengan penyusunan visi, misi, dan rencana strategis bersama para stakeholders. Sistem tata kelola perguruan tinggi juga harus memperhatikan prinsip *Good University Governance* dalam mengurangi resiko kesalahan dalam pengelolaannya. Dengan memperhatikan ruang lingkup yang meliputi unsur perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara terus menerus dilakukan berdasarkan monitoring dan evaluasi. Perwujudan tata kelola yang diharapkan harus dilakukan secara bertahap, terencana, dan terprogram dengan kerangka waktu yang jelas mulai dari tata kelola penjaminan mutu, tata kelola aspek fungsional termasuk tata kelola keuangan, dan tata kelola informasi dan digitalisasi.

Dengan demikian, belajar dari praktek perguruan tinggi kelas dunia dapat dilakukan dengan memperoleh kiat sukses agar tata kelola perguruan tinggi menjadi lebih berkualitas serta menghasilkan lulusan yang berkualitas dan siap bersaing.

Daftar Pustaka

- Didiharyono, D., & Qur'ani, B. (2019). Increasing Community Knowledge through the Literacy Movement. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 17-24.
- Handayani, T. (2015). Relevansi lulusan perguruan tinggi di Indonesia dengan kebutuhan tenaga kerja di era global. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 10(1), 53-64.
- Harun, H. (2019). Kesiapan Pendidikan Tinggi Dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0 Dalam Perspektif Kelembagaan. *Prosiding*, 4(1), 187-194.
- Hasibuan, M. S.P. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Kadir, A. (2013). Tata Kelola Perguruan Tinggi di Era ITC. *Shautut Tarbiyah*, 19(1), 66-83.
- Logli, C. (2016). Higher Education in Indonesia: Contemporary challenges in Governance, Access, and Quality. *In The Palgrave handbook of Asia Pacific higher education* (pp. 561-581). Palgrave Macmillan, New York.
- Nasution, V. I. A., Prasojo, E., Jannah, L. M., & Yumitro, G. (2020). *Governance of Autonomous Higher Education Institution toward World-Class University: A Case Study at the Universitas Indonesia*. *Governance*, 7(10), 2020.
- Primayana, K. H. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Di Perguruan Tinggi. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 1(2), 7-15.
- Rahayu, S., & Wahab, A. A. (2013). Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good University Governance Terhadap Citra Serta Implikasinya Pada Keunggulan Bersaing Perguruan Tinggi Negeri Pasca Perubahan Status Menjadi BHMN. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 17(1).
- Rajagukguk, B. (2009). *Paradigma Baru dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*. *Jurnal Tabularasa*, 6(1), 77-86.